

*Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"*

**TEMA : Meninjau Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Generasi Emas 2045**

**Pemateri :**

- 1. Dewi Rahmawati Nur Aulia – Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute**
- 2. Akim Dharmawan – Anggota Bidang Kemitraan DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia**
- 3. Adita Irawati – Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia**

**Moderator :** Putu Rusta Adijaya, Peneliti Bidang Ekonomi, The Indonesian Institute

**Partisipan :** Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

### **PEMBAHASAN**

Diskusi yang diinisiasi oleh The Indonesian Institute ini diawali dengan pemaparan Dewi Rahmawati Nur Aulia, selaku Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute. Dewi menjelaskan bahwa untuk menyiapkan generasi yang berkualitas dan memberikan manfaat ekonomi, terdapat empat komponen penting sebagaimana diungkapkan oleh Adioetomo, S.M., dan Pardede, E.L. (2018). Komponen pertama adalah pendidikan, yang mencakup tidak hanya akses yang merata tetapi juga kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Pendidikan yang baik mampu membangun keterampilan kognitif, sosial, dan teknis yang menjadi fondasi bagi daya saing individu di pasar tenaga kerja.

Komponen kedua adalah kesehatan, yang berperan penting dalam memastikan generasi muda tumbuh secara optimal, baik secara fisik maupun mental. Kesehatan yang baik memungkinkan mereka untuk belajar dan bekerja secara produktif. Dewi menekankan bahwa layanan kesehatan preventif dan kuratif yang terjangkau dan berkualitas menjadi investasi jangka panjang yang tidak dapat diabaikan.

Selanjutnya, komponen ketiga adalah paket kebijakan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja. Dewi menyoroti perlunya kebijakan yang mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis, memberikan insentif bagi dunia usaha, serta menciptakan ekosistem yang mendukung kewirausahaan. Hal ini penting agar generasi muda yang telah terdidik dan sehat memiliki peluang kerja yang memadai dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Komponen terakhir adalah tata kelola pemerintahan yang baik, yang melibatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Tata kelola yang baik memastikan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dewi menekankan bahwa koordinasi lintas sektor dan penguatan kapasitas pemerintah daerah juga menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola yang efektif.

Dewi mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi dalam implementasi program MBG (Makanan Bergizi), yang memerlukan perhatian khusus untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya. Pertama, tantangan dalam proses produksi. Mengelola skala produksi besar untuk memenuhi kebutuhan ribuan anak dalam waktu yang terbatas memerlukan koordinasi yang baik antara penyedia bahan makanan, pihak yang memasak, serta distribusi yang tepat waktu. Kualitas makanan sering kali terpengaruh oleh keterbatasan waktu produksi dan distribusi yang kurang efisien.

Kedua, perbedaan dasar makanan pokok antar wilayah Indonesia. Indonesia memiliki keragaman budaya kuliner, di mana masyarakat di berbagai daerah memiliki makanan pokok yang berbeda, seperti nasi di Jawa, sagu di Maluku dan Papua, serta jagung di Nusa Tenggara. Penyediaan menu yang tidak sesuai dengan kebiasaan lokal dapat menyebabkan anak-anak enggan mengonsumsi makanan yang diberikan. Hal ini menjadi tantangan untuk merancang menu yang bersifat fleksibel namun tetap memenuhi kebutuhan gizi yang sesuai. Ketiga, tata kelola limbah yang menjadi isu krusial dalam program ini. Produksi dan konsumsi makanan dalam skala besar dapat menghasilkan limbah organik yang signifikan. Tanpa pengelolaan yang baik, limbah makanan tersebut dapat menjadi masalah lingkungan dan bahkan menimbulkan potensi kerugian finansial. Terakhir, pengawasan yang belum optimal. Untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan aman, bergizi, dan sampai ke penerima yang tepat, diperlukan sistem pengawasan yang kuat dan terintegrasi. Pengawasan yang lemah dapat membuka celah bagi terjadinya penyimpangan dalam distribusi maupun penurunan kualitas makanan.

Dewi menekankan bahwa tantangan-tantangan ini harus dihadapi dengan perencanaan yang matang, koordinasi yang lebih baik antara pihak terkait, serta evaluasi yang terus menerus untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG di masa mendatang.

Akim melanjutkan diskusi dengan menjelaskan bahwa ketidaksukaan anak-anak terhadap menu makanan yang disediakan adalah hal yang wajar. Proses adaptasi terhadap makanan baru membutuhkan waktu dan tidak seharusnya direspons dengan teguran atau paksaan. Ia menegaskan bahwa penerimaan terhadap makanan sehat membutuhkan proses bertahap dan kesabaran.

Terkait percepatan pelaksanaan program MBG, Akim menyatakan bahwa langkah tersebut bukanlah sesuatu yang buruk. Namun, ia menekankan pentingnya evaluasi dan perencanaan ulang agar penyelenggaraan program dapat lebih optimal dan meninggalkan praktik-praktik yang tidak memberikan manfaat nyata.

Akim menyoroti kebijakan "semua makan nasi," yang mewajibkan semua wilayah di Indonesia untuk menanam padi dan menjadikan nasi sebagai makanan pokok utama. Kebijakan ini memiliki dampak signifikan terhadap pola konsumsi dan dinamika harga pangan lokal. Dengan adanya penekanan pada nasi sebagai makanan utama, jenis makanan lokal lainnya yang sebelumnya menjadi bagian dari tradisi kuliner masyarakat—seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian—menjadi terpinggirkan dan mengalami perubahan harga.

Dalam konteks ini, Akim memandang bahwa langkah MBG yang berusaha mempromosikan konsumsi *local food* adalah upaya yang patut diapresiasi. Mendorong masyarakat untuk kembali menghargai dan mengonsumsi bahan pangan lokal bukan hanya mendukung diversifikasi pangan, tetapi juga berpotensi memperkuat ketahanan pangan di berbagai daerah. Meski demikian, Akim menegaskan bahwa proses ini membutuhkan waktu dan upaya yang berkelanjutan, terutama dalam membentuk pola pikir masyarakat yang telah lama terbiasa mengutamakan nasi sebagai makanan pokok.

Adita mengungkapkan bahwa sorotan yang diterima oleh program MBG (Makanan Bergizi) tidaklah mengejutkan, mengingat program ini merupakan salah satu Program Hasil Cepat Terbaik (PHCT) atau yang dikenal dengan istilah *quick-win*, yang menjadi prioritas utama dalam pemerintahan saat ini. Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan dampak yang langsung terasa bagi masyarakat, MBG dirancang untuk memberikan solusi cepat terkait masalah gizi, terutama pada anak-anak. Program ini bertujuan untuk menciptakan perubahan signifikan dalam waktu singkat, sehingga menjadi fokus perhatian banyak pihak.

Lebih jauh lagi, Adita menjelaskan bahwa MBG merupakan manifestasi dari poin Asta Cita keempat, yang mencakup komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan kesehatan. Poin ini menekankan pentingnya menciptakan generasi yang sehat dan terdidik sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, program MBG menjadi bagian integral dari upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, dengan menyediakan makanan bergizi yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, yang pada gilirannya akan membentuk generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.

Sorotan terhadap program MBG, menurut Adita, mencerminkan tingginya harapan publik terhadap hasil yang dapat dicapai, yang tentunya membutuhkan komitmen, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan agar program

ini dapat memberikan dampak yang maksimal. Dalam hal komunikasi, Adita mengungkapkan bahwa beberapa survei menunjukkan program MBG mendapat nilai kepuasan yang tinggi dari masyarakat. Tantangan berikutnya adalah mengedukasi masyarakat agar lebih memahami pentingnya program ini.

Penggunaan kupon sebagai mekanisme distribusi juga dibahas dalam diskusi ini. Adita menyatakan bahwa hal tersebut masih akan dikaji lebih lanjut oleh Badan Gizi Nasional. Fokus utama tetap pada pengawasan agar distribusi manfaat dapat lebih tepat sasaran. Akim menambahkan bahwa penggunaan food voucher yang dapat ditukarkan dengan makanan bergizi di warung atau minimarket tertentu adalah kemungkinan yang bisa dipertimbangkan, meskipun saat ini infrastruktur dan metode pengawasan belum siap.

Terkait kritik yang muncul, Adita menegaskan bahwa penerima manfaat pada umumnya menyambut baik program MBG. Kritik dianggap sebagai hal yang wajar dan harus direspons dengan mencari solusi serta memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat. Dewi menekankan pentingnya kanal pengaduan untuk memfasilitasi laporan tanpa memicu perundungan atau tindakan sewenang-wenang. Akim menambahkan bahwa media sosial dapat menjadi kanal yang lebih cepat dibandingkan website, meskipun akuntabilitas tetap harus menjadi prioritas utama.

Di akhir diskusi, Dewi menegaskan bahwa pengawasan yang *end-to-end* sangat penting untuk memastikan keberhasilan program MBG. Akim menggarisbawahi bahwa program ini bertujuan untuk memperbaiki gizi masyarakat dan dibiayai oleh pajak rakyat. Oleh karena itu, kritik yang membangun sangat dinanti. Adita menutup diskusi dengan menyatakan bahwa sebagai program yang masih dalam tahap awal, MBG tentu memiliki kekurangan yang harus terus diperbaiki demi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Sementara, Akim setuju bahwa proses makan adalah proses yang kompleks, melibatkan banyak panca indera (hidung-aroma, mata-tampilan, rasa-lidah, dll). Selain kebiasaan dan budaya. Jadi pasti akan ada hal-hal yang mungkin kurang sesuai (normal).

**Catatan :**

1. **Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com>**
2. **Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".**

~ TERIMA KASIH ~